



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2025
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

1.	<i>RADAR BANTEN</i> ✓	4.	<i>SATELIT NEWS</i>
2.	<i>BANTEN POS</i>	5.	<i>BANTEN RAYA</i>
3.	<i>KABAR BANTEN</i>	6.	<i>Tribun Banten</i>

JANUARI	01	MEI	SEPTEMBER	2025
FEBRUARI		JUNI	OKTOBER	
MARET		JULI	NOVEMBER	
APRIL		AGUSTUS	DESEMBER	

**BPK Soroti Pengelolaan Dana BOS di Banten,
Gubernur Diminta Sanksi Kepala Sekolah dalam 60 Hari**

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SMA dan SMK di Provinsi Banten kini jadi perhatian serius Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2025, ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana BOS.

"Perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban belanja BOS pada satuan pendidikan menengah negeri tidak sesuai ketentuan," kata Anggota V BPK RI, Bobby Adhitiyo Rizaldi, dalam Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu, 30 April 2025.

Meskipun tidak menjelaskan secara rinci masalah penyalahgunaan dana BOS ini, Bobby menegaskan bahwa tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang terlibat. Ia meminta Pemprov Banten untuk memberikan sanksi sesuai aturan bagi kepala sekolah dan bendahara BOS yang tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

"Mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Kepala Satuan Pendidikan dan Bendahara BOS yang tidak memedomani ketentuan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana BOS," ujarnya tegas.

Bobby juga menekankan bahwa rekomendasi ini harus ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

"Saya minta Gubernur Banten untuk terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi ini," pungkasnya.